

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Rizka Azhara

Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
rizkaazhara44@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis: 1) Penerapan manajemen berbasis sekolah, 2) Kepala Sekolah peran dalam Implementasi manajemen berbasis sekolah, 3) Fungsi pokok dalam manajemen berbasis sekolah, 4) kendala dalam pelaksanaan manajemen Berbasis Sekolah. Jenis penelitian ini adalah desain kasus-studi kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) SMP 10 Bandar Lampung fokus dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah. 2) Peran kepala sekolah dalam penerapan manajemen berbasis sekolah adalah sesuai dengan peraturan yang mengatur prosedur dan organisasi yang tepat untuk melibatkan stakeholder dalam semua kegiatan sekolah agar kemandirian sekolah. 3) Fungsi pokok dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. 4) Hambatan dalam menangani adalah masalah dana karena banyak siswa yang tidak mampu sehingga program sekolah tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci: peran kepala sekolah, implementasi manajemen, manajemen berbasis sekolah

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe and analysis: 1) The Implementation of School-based management, 2) The Principal role in the Implementation of School-based management, 3) The function of the principal in the School-based management, 4) The constraints in the implementation of School-based management. This type of research is qualitative case-study design, data collection techniques through observation, documentation and interviews. Results of the study are: 1) Junior High School 10 Bandar Lampung focus in the implementation of School-based management. 2) The role of the principal in implementation of School-based management is in compliance with the rules governing procedure and the appropriate organizations to involve stakeholders in all school activities in order to make the school's independence. 3) The principal Function in the implementation of School-based management. 4) Obstacles in dealing with is a matter of funds because a lot of students who can't afford so that the school programs not running properly.

Keywords: the role of the principal, implementation of management, school-based management

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusiasebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogramdalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, danluar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasikemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkanperanan hidup secara tepat (Triwiyanto, 2014: 23). Melihat arti dari pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena

pendidikan dapat mengembangkan potensi dalam diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan sangat mempunyai peran dalam suatu bangsa.

Pada dasarnya pendidikan mempunyai peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan (Mulyasa, 2006: 3). Dengan adanya pendidikan mampu menggali atau mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik agar potensi tersebut dapat berguna di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan penyumbang terbesar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sedangkan kemajuan suatu bangsa dapat terlaksana apabila sumber daya manusia mempunyai kualitas yang mumpuni. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari pendidikan.

Menurut Pidarta (2014: 20) tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam arti berkembangnya potensipotensi individu secara berimbang, optimal, dan terintegrasi. Dengan demikian, pendidikan dapat meningkatkan potensi yang terdapat dalam diri manusia yang bertujuan untuk mengatur suatu kehidupan agar terlaksana secara tepat dan berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, dan suatu bangsa. Akan tetapi, untuk merealisasikan suatu tujuan dari pendidikan harus mempunyai dasar yang kuat yaitu sebuah kebijakan. Arti pendidikan dan tujuan pendidikan tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak dilandasi oleh suatu kebijakan. Istilah kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari “educational policy”, yang tergabung dari kata education dan policy. Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Hasbullah, 2015: 40). Kebijakan pendidikan dibuat pemerintah agar dapat mengatasi suatu permasalahan dalam pendidikan dimana permasalahan tersebut dianggap sangat vital oleh pemerintah. Di Indonesia kebijakan pendidikan sangatlah penting dan berpengaruh, karena kebijakan pendidikan akan menjadi dasar atau kunci dari terlaksananya kegiatan pembelajaran yang baik, terarah, dan dapat mencapai tujuan dari kegiatan pembelajaran tersebut.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah merumuskan berbagai macam kebijakan pendidikan salah satunya tentang kebijakan mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menyebutkan tentang tiga jalur pendidikan yang saling terkait dan saling memengaruhi antara ketiganya, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Dalam dunia pendidikan jalur yang sering digunakan adalah jalur pendidikan formal atau yang sering disebut sebagai jalur pendidikan sekolah, khususnya tentang aspek-aspek yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan pendidikan sekolah atau dewasa ini telah dikembangkan satu konsep yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan yang demikian menuntut langsung sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Seperti yang disampaikan Berlian (2013: 3), bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu bentuk manajemen atau pengelolaan

sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku. Munculnya manajemen berbasis sekolah dilatarbelakangi oleh kurang baiknya sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah tersebut dapat terlaksana apabila ada yang melatar belakangi untuk merumuskan kebijakan tersebut. Latar belakang munculnya Manajemen Berbasis Sekolah disebabkan oleh sistem pemerintah pusat yang memberikan hak wewenang dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab (Mulyasa, 2006). Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut meliputi banyak hal salah satunya kewenangan mengenai pendidikan. Desentralisasi pemerintah yang telah melahirkan otonomi daerah, khususnya dalam bidang pendidikan, dan kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan, otonomi daerah tersebut telah melahirkan satu kebijakan yang kemudian dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah. Itulah sebabnya, kebijakan Manajemen Berbasis sekolah dapat disebut sebagai pengejawantahan dari kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, yaitu desentralisasi pemerintah dan otonomi daerah (Suparlan, 2013). Akan tetapi, penerapan model Manajemen Berbasis Sekolah masih terdapat suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada penerapan model Manajemen Berbasis Sekolah adalah di mana model tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan sedangkan pemahaman dari mutu pendidikan sangat berarti luas. Nurkolis (2005: 108) menyebutkan bahwa di Indonesia model Manajemen Berbasis Sekolah difokuskan pada peningkatan mutu, akan tetapi tidak tertera jelas yang dimaksud dengan mutu bagaimana. Perumusan mutu tersebut terlalu luas untuk dicakup semua dalam model Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia. Dengan demikian, banyak sekolah masih merasa kebingungan akan arti dari Manajemen Berbasis Sekolah tersebut dan menjadikan pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah masih tergolong belum sempurna.

METODE

Penelitian kualitatif menurut Williams (dalam Prastowo, 2012:23), “pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen pengambil data, menggunakan natural setting, dan menggunakan metode alamiah. Sehingga peneliti disini berperan sebagai instrumen pengambil data di lapangan dengan menggunakan metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, karena penelitian ini menganalisis gejala-gejala atau kasus yang ada di lapangan secara langsung dengan latar

yang alamiah. Melalui studi kasus, peneliti akan mengungkap fenomena mengenai peran kepala sekolah dalam implementasi MBS dan memaparkan secara intensif dan rinci. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ulfatin (2013:46), yaitu studi kasus adalah suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu secara intensif dan rinci. Studi kasus juga dimaksudkan untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara unsur-unsur yang terkandung di dalam kasus dan lingkungannya serta umumnya bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilihat dari jenisnya, diperoleh berdasarkan dua sumber data yaitu sumber primer dan sekunder (Sarwono, 2006:209). Data primer akan diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu pengawas, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orantua peserta didik, security, dan petugas kantin. Data sekunder dapat diperoleh dari data dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Wiyono (dalam Burhanudin, 2007:79), “wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara peneliti dan subjek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, mengkonstruksi dan memproyeksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain”. Menurut Hadi (dalam Prastowo, 2012:220) menjelaskan bahwa pengamatan (observasi) yaitu “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian”. Menurut Sarwono (2006:225) menjelaskan “kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tertulis lainnya”. Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data di lapangan selengkap-lengkapnyanya, kemudian dilakukan reduksi data dengan menyortir data-data yang hanya sesuai kebutuhan dalam konteks penelitian, sehingga data dapat disajikan dan hasilnya akan dijadikan kesimpulan penelitian atau verifikasi data (Miles & Huberman dalam Patilima, 2013:102). Teknik pengecekan keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan triangulasi. Pengertian triangulasi menurut Patton (dalam Moleong, 2005:330) “...membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 juga menyebutkan tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan tentang tiga jalur pendidikan yang saling terkait dan saling memengaruhi antara ketiganya, yaitu (1) jalur pendidikan formal, (2) jalur pendidikan non formal, dan (3) jalur pendidikan informal. Dalam lingkungan pendidikan jalur yang sering digunakan adalah jalur pendidikan formal atau yang sering disebut sebagai jalur pendidikan sekolah. Pada pendidikan formal, untuk aspek-aspek yang terkait dengan manajemen atau pengelolaan pendidikan sekolah atau dewasa ini telah dikembangkan satu konsep yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen Berbasis Sekolah adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dimilikinya kewenangan sekolah itu karena terjadi pergeseran kekuasaan

dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada sekolah langsung dalam pengelolaan sekolah. Dengan adanya kewenangan yang besar tersebut maka sekolah memiliki otonomi, tanggung jawab, dan partisipasi dalam menentukan program-program sekolah menurut Nurkolis (2003). Pada pengertian ini Nurkolis lebih menekankan pada seluruh pihak sekolah yang dilibatkan penuh dalam penentuan program-program sekolah, seluruh pihak sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik, komite sekolah, pihak kantin, dan orang tua dari peserta didik. Hal yang berbeda mengenai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah menurut Suparlan yang lebih menekankan pada semua pemangku kepentingan pendidikan di sekolah yang harus terlibat dalam proses penentuan kebijakan sekolah. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah guna menentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menjalin kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dibentuknya kebijakan mengenai Manajemen Berbasis Sekolah tentu tidak lepas untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah (Mulyasa, 2006: 13).

Pada pendefinisian tujuan Manajemen Berbasis Sekolah yang disampaikan oleh Mulyasa, pendefinisianya masih secara luas. Penyampaian yang berbeda dengan pendefinisian tujuan Manajemen Berbasis Sekolah secara terperinci yang disampaikan oleh Berlian.

Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan. Keharusan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah melalui pemberian kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolah dengan maksud tujuan sebagai berikut (Berlian, 2013: 9) :

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga sekolah dapat lebih leluasa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memajukan sekolah.
2. Sekolah lebih mengetahui semua yang dibutuhkan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tau apa yang terbaik untuk dikembangkan disekolahnya.

4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah akan dapat menciptakan transparansi yang sehat.
5. Sesuai dengan butir 4 di atas, diharapkan semua warga sekolah akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama rasa tanggung jawab terhadap pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang direncanakan.
6. Terjadinya persaingan yang sehat antar sekolah di lingkup kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional dalam hal mutu pendidikan. Ini dilakukan melalui upaya-upaya inovatif yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah.
7. Secara yuridis, Manajemen Berbasis Sekolah telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku untuk diterapkan di sekolah baik tingkat usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan pendapat Nurkolis (2005), yaitu tujuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas bukan hanya meningkatnya pengetahuan dan keterampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula.

KESIMPULAN

Manajemen Berbasis Sekolah adalah suatu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah guna menentukan suatu kebijakankebijakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menjalin kerja sama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan semua kualitas dalam pendidikan dengan cara memandirikan atau memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengelola sendiri seluruh kebutuhan sekolah yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah mempunyai tujuh pilar yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilihat dari organisasi sekolah, proses belajar mengajar, dan sumber daya manusia yang semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keputusan atau kebijakan sekolah yang menginginkan peningkatan kualitas pendidikan. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan dari pihak luar. Dan kepala sekolah harus dapat memahami jabatannya sebagai manajer dari sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah harus mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan luar seperti komite sekolah, masyarakat, dan orang tua dari peserta didik, karena pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah dapat berjalan efektif dan efisien apabila hubungan antarmanusia berjalan dengan lancar. Berbeda dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di

berbagai negara di mana Manajemen Berbasis Sekolah muncul dengan inisiatif dari orang tua peserta didik dan masyarakat, sedangkan di Indonesia muncul karena inisiatif dari pemerintah.

SARAN

Pemerintah harus lebih giat lagi untuk melakukan sosialisasi tentang Manajemen Berbasis Sekolah kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah masih belum memahami tentang tugas pokok kepala sekolah sebagai manajer sekolah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengelola sendiri sekolah tersebut dengan keterlibatan masyarakat umum untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan agar dalam pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah dapat berjalan sesuai harapan. Kepala sekolah harus memberikan pemahaman lebih tentang tanggung jawab kepada seluruh penghuni sekolah agar dapat melakukan tugas dengan baik dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah, Pihak sekolah harus lebih melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan di luar sekolah agar dapat membantu dan saling bekerjasama mencapai tujuan sekolah, karena hal tersebut merupakan bagian dari pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., Rini, C. P., & Amaliyah, A. (2021). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V Dalam Pembelajaran Ipa Di Sdn Karang Tengah 11 Kota Tangerang. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(1), 33-44.
- Aritonang, I. 2018. Peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.
- Berlian, I. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, F. 2008. Manajemen Berbasis Sekolah Solusi Peningkatan Kualitas Pendidikan.
- Harismanto. 2018. Segera Terapkan Konsep MBS, Ini Persiapan Kepala Sekolah di 5 Kabupaten di Riau.
- Haryadi, M. 2017. Jamin Keberhasilan Belajar Siswa dengan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajagrafindoPersada.
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta cv.
- Mahdayeni. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah.
- Mulyasa, E. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutarto, M., Darmansyah dan Warsono, S. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah*.
- Nugroho, R. dan Tilaar, H.A.R. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model, dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Pasaribu, A. 2017. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah.
- Suardi, Moh. 2016. *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks.
- Suparlan. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Dari Teori Sampai Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triwiyanto, T. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.